

ABSTRAK

Tesis ini berjudul Transformasi Politik di Loloda-Maluku Utara (1808-1945). Tesis ini membahas mengenai aspek-aspek perubahan dalam sistem pemerintahan dan kepemimpinan di Loloda sebagai akibat dari pengaruh politik kolonial Belanda, Inggris, pendudukan Bala Tentara Jepang dan Kesultanan Ternate. Selain itu, tesis ini juga melihat bagaimana pengaruh sosial-budaya dan sosial-ekonomi terhadap transformasi politik di Loloda-Maluku Utara. Pokok permasalahan yang dibahas adalah: *pertama*, bagaimana transformasi politik di Loloda dari 1808 sampai 1945?; *kedua*, bagaimana pengaruh sosial-budaya dan sosial ekonomi terhadap transformasi politik di Loloda dari 1808-1945?; *ketiga*, bagaimana sampai terjadi transformasi politik di Loloda dari 1808-1945? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari *heuristik*, *kritik*, *interpretasi*, dan *historiografi*. Sementara sumber yang digunakan yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa arsip-arsip pada zaman Hindia Belanda dan artikel-artikel pada masa Hindia Belanda, sedangkan sumber sekunder berupa buku, artikel, dan visual baik yang terdapat dalam surat kabar maupun dalam situs internet, serta sumber lisan berupa wawancara. Sementara konsep yang digunakan untuk menganalisis masalah adalah konsep transformasi, sistem politik, kekuasaan, stratifikasi sosial dan perubahan sosial, serta konsep legitimasi atau keabsahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi politik dalam bidang pemerintahan dan kepemimpinan di Loloda pada masa kolonial (1808-1909) mengalami degradasi dengan diubahnya status Kerajaan Loloda menjadi distrik oleh Pemerintah Hindia Belanda. Namun, pemimpinnya tetap memakai gelar raja (*kolano*) karena didukung oleh otoritas dan legitimasi tradisional, kharismatik, serta sistem pewarisan kekuasaan (*assigned status*) dalam status sosialnya. Dalam konteks ini, Pemerintah Kolonial juga mengakui gelar raja (*kolano*) sebagai strategi membangun kekuasaannya di Loloda. Pengakuan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap gelar raja (*kolano*) berakhir pada 1909 ketika raja dianggap mendalangi pemberontakan warganya yang mengakibatkan tewasnya Petugas Belanda di Loloda. Saat itulah kepala distrik (*hoofd district*) memakai gelar *sangaji*. Pada masa kemerdekaan Indonesia, kedudukan pemimpin tradisional disimbolkan dengan mangkubumi (*jogugu*), namun masyarakat Loloda menganggapnya sebagai raja (*kolano*). Dengan demikian kedudukan pemimpinnya terlembagakan berdasarkan otoritas dan legitimasi tradisional, kharismatik, dan sistem pewarisan status sosial. Adapun pengaruh sosial-budaya dan sosial-ekonomi terhadap transformasi politik adalah memperkuat sistem politik pada satu sisi, sedangkan pada sisi yang lain melemahkan sistem politik di Loloda. Pengaruh Islam, keberadaan orang-orang Baharu, dan adanya hubungan raja dengan rakyat dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi, memperkuat sistem politik, sedangkan misi *zending*, pengaruh bahasa Ternate, kepentingan ekonomi Kesultanan Ternate, dan keadaan dan populasi penduduk yang relatif rendah melemahkan sistem politik.

Kata kunci: Loloda, transformasi, status, kedudukan, legitimasi.

ABSTRACT

The title of this thesis is Political Transformation in Loloda-North Maluku (1808-1945). This thesis addresses aspects of change in leadership and administrative system in Loloda, as a result of effects of Colonial Dutch, England, Japan Army Occupation, and Ternate Sultanate. Furthermore, this thesis looks at how both socio-culture and socio-economy affects political transformation in Loloda-North Maluku. The subject matters addressed are: first, how political transformation in Loloda from 1808 to 1945? Second, how socio-culture and socio-economy affects political transformation in Loloda from 1808-1945? Third, how political transformation was taking place in political transformation in Loloda from 1808-1945? Method used in this research is historical method consisting of heuristic, critical, interpretative, and historiographic. Sources used are primary and secondary. Primary sources are archives and articles of The East Indies period, while secondary sources are books, articles, written and verbal traditions, and visual found on internet site, as well as verbal sources such as interviews. Concepts used to analyze issues are transformation, political systems, status, social stratification and social transformation, and legitimation. The results of the research suggest that political transformation of administration and leadership in Loloda in colonial period (1808-1909) has degradation by change in Loloda Kingdom status into a district by The East Indies Government. However, its leader is still using the title of king (kolano) as it is supported by traditional legitimation and authority, charismatic, and assigned status system in the social status. In this context, the Colonial Government is also recognizing the title of king (kolano) as a strategy to build dominance in Loloda. The recognition of Colonial Dutch Government for the title of king (kolano) become extinct in 1909 when king is considered power behind the citizen rebellion resulting in the lose of Dutch Official in Loloda. It is moment of hoofd district use the title of sangaji. In Indonesian liberty period, the position of traditional leader was symbolized by the high administrator (jogugu); however, Loloda people regard it as king (kolano). Thus, the position of leaders was institutionalized based on authority and traditional legitimation, charismatic, and assigned status system. The effect of the socio-culture on the political transformation is strengthening political system in one side; whereas, in other side, it is debilitating political system in Loloda. The effect of Islam, the existence of Baharu people, and any relationship between king and people in utilization of economic resources strengthen political system, while zending mission, the effect of Ternate language, Ternate Sultanate interest, and relative low condition and population debilitate political system.

Keywords: Loloda, transformation, status, position, legitimation.